



Juhanperak  
e-ISSN : 2722-984X  
p-ISSN : 2745-7761

## **ANALISIS *VALUE FOR MONEY* PADA LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**

**LIA HARI KURNIAWATI**

Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Islam Kuantan Singingi,  
Jl. Gatot Subroto KM 7, Kebun Nenas, Teluk Kuantan, Kabupaten Kuantan Singingi.  
email: [liahari.kurniawati@gmail.com](mailto:liahari.kurniawati@gmail.com)

### **ABSTRACT**

*This study aims to determine the performance of the Kuantan Singingi Regency Community and Village Empowerment Social Service in 2019, 2020 and 2021 by using the concept of value for money. In the Government Agency Performance Accountability Report (LAKIP) of the Social Service for Community and Village Empowerment of Kuantan Singingi Regency, there are several programs/activities whose budget realization has not been maximized from the set budget targets.*

*The type of research used is descriptive qualitative. The sample in this study is Government Agency Performance Accountability Reports (LAKIP) at the Social and Village Empowerment Offices of Kuantan Singingi Regency in 2019, 2020 and 2021. The data sources used in this research are Primary Data obtained from interviews and Secondary Data from Reports Government Agency Performance Accountability (LAKIP) and literature related to research. The analysis technique uses the concept of value for money which consists of elements of economy, efficiency and effectiveness.*

*The results of the study, namely in terms of the economic ratio of programs/activities carried out by the Social Service for Community and Village Empowerment of Kuantan Singingi Regency in 2019-2021, were declared economical. In 2019 the total program/activity was 93.49%, in 2020 it was 89.70% and in 2021 it was 82.44%. Judging from the efficiency ratio, in 2019 it was stated to be efficient with a total program/activity of 100.54%, in 2020 it was stated to be efficient with a total program/activity of 100.33% and in 2021 it was stated to be balanced efficient with a total of 100 programs/activities .00%. Judging from the ratio of the effectiveness of the performance indicators achieved by the Kuantan Singingi District Community and Village Social Empowerment Office in 2019,2020 and 2021 was declared ineffective with criteria of less than 100% .Reviewed in terms of community service, facilities and infrastructure as well as community satisfaction have been said to be good.*

**Keywords: Economical, Efficiency, Effectiveness, Value For Money, Performance**

### **ABSTRAK**

*Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja Dinas Sosial Pemeberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kuantan Singingi pada tahun 2019,2020 dan 2021 dengan menggunakan konsep value for money. Dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Sosial Pemeberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kuantan Singingi terdapat beberapa program/kegiatan yang realisasi anggarannya masih belum maksimal dari target anggaran yang telah ditetapkan.*



**Juhanperak**  
**e-ISSN : 2722-984X**  
**p-ISSN : 2745-7761**

*Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Sampel dalam penelitian ini adalah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) pada Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2019, 2020 dan 2021. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Data Primer yang diperoleh dari hasil wawancara dan Data Sekunder dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dan literatur yang berkaitan dengan penelitian. Teknik analisis menggunakan konsep value for money yang terdiri dari elemen ekonomis, efisiensi, dan efektivitas.*

*Hasil dari penelitian yaitu ditinjau dari rasio ekonomis program/kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kuantan Singingi pada tahun 2019-2021 dinyatakan ekonomis. Tahun 2019 total keseluruhan program/kegiatan sebesar 93,49%, tahun 2020 sebesar 89,70% dan tahun 2021 sebesar 82,44%. Ditinjau dari rasio efisiensi pada tahun 2019 dinyatakan efisien dengan total keseluruhan program/kegiatan sebesar 100,54%, tahun 2020 dinyatakan efisien dengan total keseluruhan program/kegiatan sebesar 100,33% dan tahun 2021 dinyatakan efisien berimbang dengan total keseluruhan program/kegiatan sebesar 100,00%. Ditinjau dari rasio efektivitas indikator kinerja yang dicapai oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kuantan Singingi pada tahun 2019, 2020 dan 2021 dinyatakan tidak efektif dengan kriteria kurang dari 100%. Ditinjau dari segi pelayanan masyarakat, sarana dan prasarana serta kepuasan masyarakat sudah dikatakan baik.*

**Kata Kunci : Ekonomis, Efisiensi, Efektivitas, Value For Money, Kinerja**

## **1. PENDAHULUAN**

Organisasi sektor publik merupakan salah satu instansi pemerintah yang bertugas membantu pemerintah dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat umum berupa pelayanan pada bidang pendidikan, transportasi, kesehatan, keamanan, jasa pelayanan publik, kepastian hukum, dan lain sebagainya. Dari sudut pandang ilmu ekonomi, sektor publik dapat dipahami sebagai suatu entitas yang aktivitasnya berhubungan dengan usaha untuk menghasilkan barang dan pelayanan publik dalam rangka memenuhi kebutuhan dan hak publik (Mardiasmo, 2018:2).

Sektor publik merupakan sektor yang memberikan pelayanan kepada masyarakat oleh sebab itu sektor publik dituntut untuk dapat mempertanggung jawabkan kinerjanya (Hidayah, 2017:1). Organisasi dapat dikatakan baik dalam pengelolaannya, dilihat dari bagaimana kinerjanya. Dalam konteks organisasi pemerintah, akuntabilitas publik adalah memberikan informasi kepada publik yang menjadi pemangku kepentingan (*stakeholder*) (Mahmudi, 2015:9).

Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam *strategic planning* suatu organisasi (Mahsun, dkk., 2015:141). Istilah kinerja sering disebut prestasi atau tingkat keberhasilan individu maupun kelompok individu. Kinerja dapat diketahui jika individu atau kelompok individu tersebut mempunyai kriteria keberhasilan yang telah ditetapkan. Dalam artian, kinerja dikatakan berhasil apabila suatu organisasi mempunyai kriteria keberhasilan atau tolak ukur kinerja berupa target yang ingin dicapai. Dalam



**Juhanperak**  
**e-ISSN : 2722-984X**  
**p-ISSN : 2745-7761**

menentukan tolak ukur kinerja yang sesuai diperlukan sistem pengukuran kinerja. Hal ini bertujuan untuk membantu organisasi fokus pada sasaran yang telah ditetapkan.

Sistem pengukuran kinerja sektor publik merupakan suatu sistem yang bertujuan untuk membantu manajer publik menilai pencapaian suatu strategi melalui alat ukur finansial dan nonfinansial (Mardiasmo, 2018:121). Kinerja instansi pemerintah kini menjadi sorotan dengan semakin tingginya kesadaran masyarakat terhadap penyelenggaraan administrasi publik. Sektor publik sering dinilai sebagai sarang inefisiensi, pemborosan, sumber kebocoran dana, dan institusi yang selalu merugi (Mardiasmo, 2018:4). Masyarakat yang semakin cerdas dan kritis juga menuntut dilakukannya transparansi dan akuntabilitas publik oleh lembaga - lembaga sektor publik. Kondisi ini mendorong peningkatan kebutuhan adanya suatu pengukuran kinerja untuk melihat sejauh mana kinerja yang telah dihasilkan sektor publik dalam suatu periode tertentu dibandingkan dengan yang telah direncanakan (Mahsun, dkk., 2015:142).

Salah satu cara dalam pengukuran kinerja dapat menggunakan konsep *value for money*, yaitu melakukan pengukuran/penilaian suatu kinerja dengan menggunakan rasio ekonomis, rasio efisiensi, serta rasio efektivitas, apakah pada program yang telah dirancang sudah termasuk dalam kategori yang ekonomis, efisiensi serta efektivitas. Mardiasmo (2018:127) mengatakan *value for money* adalah inti pengukuran kinerja pada organisasi pemerintah. Kinerja pemerintah tidak bisa dinilai dari sisi *output* yang dihasilkan saja, akan tetapi harus mempertimbangkan *input*, *output* dan *outcome* secara bersamaan.

*Value for money* merupakan konsep pengelolaan organisasi sektor publik yang mendasarkan pada tiga elemen utama, yaitu ekonomi, efisiensi, dan efektivitas (Mardiasmo, 2018:4). Ekonomi yaitu sejauh mana organisasi sektor publik meminimalisir *input resources* yang digunakan, dengan menghindari pengeluaran yang boros dan tidak produktif. Efisiensi adalah perbandingan *output/input* yang berkaitan dengan standar kinerja atau target yang telah ditetapkan. Efektivitas adalah tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan.

Pengukuran kinerja merupakan proses yang sangat penting untuk menilai akuntabilitas pemerintah daerah dalam melakukan pengelolaan keuangan daerah. Akuntabilitas bukan hanya menunjukkan kemampuan bahwa uang publik dibelanjakan tetapi juga menunjukkan kemampuan bahwa uang publik tersebut dibelanjakan secara ekonomi, efisien, dan efektif (Mardiasmo, 2018:121).

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) adalah media akuntabilitas yang dapat dipakai atau digunakan oleh instansi pemerintah untuk melaksanakan kewajiban menjawab pihak-pihak yang berkepentingan (Yusrianti dan Rika, 2015). Sedangkan Menurut Ramadhan (2014) Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) adalah laporan pertanggungjawaban instansi pemerintah kepada publik dan pejabat berwenang yang merupakan suatu kewajiban untuk disusun oleh instansi pemerintah. Dari laporan kinerja ini, masyarakat sebagai pengguna informasi publik dapat mengetahui secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja suatu instansi yang telah ditetapkan. LAKIP merupakan gambaran kinerja yang dicapai suatu instansi pemerintah atas pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai oleh APBN/APBD.



**Juhanperak**  
**e-ISSN : 2722-984X**  
**p-ISSN : 2745-7761**

Menurut Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kuantan Singingi pada tahun 2019-2021 realisasi pengeluaran keuangan untuk masing-masing program/kegiatan masih terdapat beberapa program/kegiatan yang realisasi anggarannya masih kecil dari yang dianggarkan. Pada tahun 2019 terdapat 10 program yang dijalankan, pada tahun 2020 terdapat 9 program yang dijalankan dan pada tahun 2021 terdapat 12 program yang dijalankan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kuantan Singingi.

Pada tahun 2019 program yang mencapai realisasi penuh adalah Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan sebesar Rp.5.323.000, dan pada tahun 2020 program yang mencapai realisasi penuh adalah Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa sebesar Rp.1.900.000, sementara pada tahun 2021 tidak terdapat realisasi anggaran penuh akan tetapi realisasi anggaran tertinggi adalah Program Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sebesar Rp. 31.950.000.

Sedangkan program dengan realisasi terendah pada tahun 2019 adalah Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial sebesar Rp. 417.287.200, pada tahun 2020 realisasi anggaran terendah adalah Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa sebesar Rp.248.985.600, dan tahun 2021 realisasi anggaran terendah adalah Program Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sebesar Rp. 5.325.156.253. Dengan adanya program yang tidak mencapai target pada tahun 2019 sampai tahun 2021 membuktikan bahwa anggaran Dinas Sosial Pemberdayan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kuantan Singingi belum terealisasi sepenuhnya.

Pada tahun 2019 selisih dari total anggaran dengan total realisasi anggaran sebesar Rp.189.667.571, pada tahun 2020 selisih total anggaran dengan total realisasi anggaran sebesar Rp.300.596.715 dan pada tahun 2021 selisih total anggaran dan total realisasi anggaran sebesar Rp.1.586.975.201. ini menunjukkan setiap tahunnya selisih total anggaran dengan total realisasi anggaran terus meningkat, yang artinya anggaran belum terserap dengan optimal. Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **Analisis Value For Money Pada Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Sosial Pemeberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kuantan Singingi.**

## **2. TINJAUAN PUSTAKA**

### **2.1. Landasan Teori**

#### **2.1.1. Sektor Publik**

##### **2.1.1.1. Pengertian Sektor Publik**

Dari sudut pandang ilmu ekonomi, sektor publik dapat dipahami sebagai suatu entitas yang aktivitasnya berhubungan dengan usaha untuk menghasilkan barang dan pelayanan publik dalam rangka memenuhi kebutuhan dan hak publik (Mardiasmo, 2018:2). Mahsun, dkk (2015:5) menyatakan bahwa sektor publik adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan kepentingan



umum dan penyediaan barang atau jasa kepada publik yang dibayar melalui pajak atau pendapatan negara lain yang diatur dengan hukum.

#### **2.1.1.2. Organisasi Sektor Publik**

Di berbagai negara, cakupan organisasi sektor publik sering tidak sama. Tidak ada definisi yang secara komprehensif dan lengkap bisa digunakan untuk semua sistem pemerintahan. Area organisasi sektor publik sering berubah-ubah tergantung pada kejadian historis dan suasana politik yang berkembang di suatu negara (Mahsun, dkk., 2015:12). Organisasi sektor publik adalah organisasi yang berorientasi pada kepentingan publik (Sujarweni, 2015:3).

#### **2.1.1.3. Persamaan dan Perbedaan Organisasi Sektor Publik dan Swasta**

Mahsun, dkk (2015:15) menyebutkan terdapat beberapa persamaan sektor publik dan swasta, antara lain :

1. Bagian dari Sistem Ekonomi Negara
2. Kelangkaan Sumber Daya
3. Proses Pengendalian Manajemen
4. Produk
5. Peraturan Perundangan

Menurut Mahsun, dkk (2015:16) terdapat beberapa perbedaan sifat dan karakteristik organisasi sektor publik dengan sektor swasta.

1. Tujuan organisasi
2. Sumber pendanaan
3. Pertanggungjawaban
4. Struktur organisasi
5. Karakteristik anggaran
6. Sistem akuntansi
7. Kriteria keberhasilan
8. Kecenderungan sifat
9. Dasar operasional

#### **2.1.2. Pengukuran Kinerja Sektor Publik**

##### **2.1.2.1. Pengertian Kinerja dan Pengukuran Kinerja**

Kinerja (*performance*) merupakan gambaran mengenai tingkat keberhasilan pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam *strategic planning* suatu organisasi (Mahsun, dkk., 2015:141).

Pengukuran kinerja merupakan proses penilaian kemajuan pekerjaan terhadap tujuan dan sasaran yang ditetapkan sebelumnya, termasuk informasi atas: efisiensi penggunaan sumber daya untuk menghasilkan barang dan jasa; kualitas barang dan jasa yaitu seberapa baik barang dan jasa diberikan pada pelanggan serta sejauh mana kepuasan pelanggan; hasil kegiatan dibandingkan dengan maksud yang diinginkan; dan efektifitas tindakan dalam mencapai tujuan (Mahsun, dkk., 2015:141).



#### 2.1.2.2. Tujuan Pengukuran Kinerja Sektor Publik

Menurut Sujarweni (2015:107) tujuan pengukuran kinerja sektor publik adalah:

1. Akan dapat memperbaiki kinerja masa yang akan datang agar lebih baik dalam mencapai tujuan organisasi sektor publik.
2. Pengukuran kinerja dapat digunakan sebagai pengambilan keputusan misalnya, mengganti kebijakan, mempertahankan pimpinan.
3. Mewujudkan tanggung jawab publik.
4. Untuk mengkomunikasikan strategi menjadi lebih baik antara atasan dan bawahan.
5. Mengalokasikan sumber daya.
6. Untuk mengukur kinerja finansial dan *non*-finansial secara berimbang sehingga dapat ditelusuri perkembangan pencapaian strategi.
7. Pengukuran kinerja mendorong terciptanya akuntabilitas publik.

#### 2.1.2.3. Manfaat Pengukuran Kinerja Sektor Publik

Manfaat pengukuran kinerja menurut Mardiasmo (2018:122) yaitu:

1. Memberikan pemahaman mengenai ukuran yang digunakan untuk menilai kinerja manajemen.
2. Memberikan arah untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan.
3. Untuk memonitor dan mengevaluasi pencapaian kinerja dan membandingkannya dengan target kinerja serta melakukan tindakan korektif untuk memperbaiki kinerja.
4. Sebagai dasar untuk memberikan penghargaan dan hukuman (*reward & punishment*) secara objektif atas pencapaian prestasi yang diukur dengan sistem pengukuran kinerja yang telah disepakati.
5. Sebagai alat komunikasi antara bawahan dan pimpinan dalam rangka memperbaiki kinerja organisasi.
6. Membantu mengidentifikasi apakah kepuasan pelanggan sudah terpenuhi.
7. Membantu memahami proses kegiatan instansi pemerintah.
8. Memastikan bahwa pengambilan keputusan dilakukan secara objektif.

#### 2.1.1.4. Aspek-Aspek Pengukuran kinerja Sektor Publik

Menurut Mahsun (2013:31) pengukuran kinerja sektor publik meliputi aspek-aspek antara lain:

1. Kelompok masukan (*input*) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran.
2. Kelompok proses (*process*) adalah ukuran kegiatan, baik dari segi kecepatan, ketepatan, maupun tingkat akurasi pelaksanaan kegiatan tersebut.
3. Kelompok keluaran (*output*) adalah sesuatu yang diharapkan langsung dapat dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berwujud (*tangible*) maupun tidak berwujud (*intangible*).
4. Kelompok hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah yang mempunyai efek langsung.
5. Kelompok manfaat (*benefit*) adalah sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan.



6. Kelompok dampak (*impact*) adalah pengaruh yang ditimbulkan baik positif maupun negative.

### **2.1.3. Value For Money**

#### **2.1.3.1. Pengertian Value For Money**

Menurut Mardiasmo (2018:4) *value for money* merupakan konsep pengelolaan organisasi sektor publik yang mendasarkan pada tiga rasio utama, yaitu ekonomis, efisiensi dan efektivitas. Menurut Mahmudi (2015:83) *value for money* adalah konsep dalam organisasi sektor publik yang memiliki pengertian penghargaan terhadap nilai uang. Pengukuran kinerja *value for money* adalah pengukuran kinerja untuk mengukur ekonomi, efisien dan efektivitas suatu kegiatan, program, dan organisasi.

#### **2.1.3.2. Indikator Value For Money**

Mardiasmo (2018:130) mengungkapkan indikator *value for money* dibagi menjadi dua bagian yaitu indikator alokasi biaya (ekonomis dan efisiensi) dan indikator kualitas pelayanan (efektivitas).

#### **2.1.3.3. Manfaat Implementasi Konsep Value For Money**

Manfaat implementasi konsep *value for money* menurut Mardiasmo (2018:7) antara lain:

1. Meningkatkan efektivitas pelayanan publik, dalam arti pelayanan yang diberikan tepat sasaran.
2. Meningkatkan mutu pelayanan public karena hilangnya inefisiensi dan terjadinya penghematan dalam penggunaan input.
3. Menurunkan biaya pelayanan publik.
4. Alokasi belanja yang lebih berorientasi pada kepentingan publik.
5. Meningkatkan kesadaran akan uang publik (*public costs awareness*) sebagai akar pelaksanaan akuntabilitas publik.

### **2.1.4. Pengukuran Kinerja Value For Money**

Pengukuran kinerja *value for money* (ekonomi, efisiensi, dan efektivitas) merupakan bagian terpenting setiap pengukuran kinerja organisasi sektor publik (Mahmudi, 2015:89)

#### **2.1.4.1. Pengukuran Ekonomi**

Menurut Mardiasmo (2018:4) ekonomi merupakan perbandingan *input* dengan *input value* yang dinyatakan dalam satuan moneter. Ekonomi terkait dengan sejauh mana organisasi sektor publik bisa meminimalisir *input resource* yang digunakan yaitu dengan menghindari pengeluaran yang boros dan tidak produktif.

#### **2.1.4.2. Pengukuran Efisiensi**

Menurut Mardiasmo (2018:4) efisiensi adalah pencapaian *output* yang maksimum dengan *input* tertentu ataupun pengguna *input* yang terendah untuk menggapai *output* tertentu.



Efisiensi merupakan perbandingan *output/input* yang dikaitkan dengan standar kinerja ataupun sasaran yang sudah ditetapkan.

### **2.1.4.3. Pengukuran Efektivitas**

Menurut Mardiasmo (2018:4) efektivitas merupakan tingkatan pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan. Secara sederhana efektivitas merupakan perbandingan *outcome* dengan *output*.

### **2.1.5. Akuntabilitas Publik**

#### **2.1.5.1. Pengertian Akuntabilitas Publik**

Akuntabilitas sering dimaknai sebagai bentuk dari pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat atas segala program atau aktivitas kerja yang telah dilakukan (Hartati, dkk., 2022:36). Menurut Mardiasmo (2018:20) akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.

#### **2.1.5.2. Macam- macam Akuntabilitas Publik**

Mardiasmo (2018:21) menyebutkan akuntabilitas publik terdiri dari dua macam yaitu :

1. Pertanggungjawaban vertikal (*vertical accountability*) adalah pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi, misalnya pertanggungjawaban unit-unit kerja (dinas) kepada pemerintah daerah, pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, dan pemerintah pusat kepada MPR.
2. Pertanggungjawaban horizontal (*horizontal accountability*) adalah pertanggungjawaban kepada masyarakat luas.

#### **2.1.5.3. Dimensi Akuntabilitas Publik**

Mardiasmo (2018:21) menjelaskan empat dimensi akuntabilitas yang harus dipenuhi oleh organisasi sektor publik.

1. Akuntabilitas Kejujuran dan Akuntabilitas Hukum
2. Akuntabilitas Proses
3. Akuntabilitas Program
4. Akuntabilitas Kebijakan

### **2.1.6. Penganggaran Sektor Publik**

#### **2.1.6.1. Pengertian Anggaran Sektor Publik**

Menurut Mardiasmo (2018:61) anggaran sektor publik merupakan instrument akuntabilitas atas pengelolaan dana publik dan pelaksanaan program-program yang dibiayai dengan uang publik. Anggaran publik berisi rencana kegiatan yang direpresentasikan dalam bentuk rencana perolehan pendapatan dan belanja dalam satuan moneter.





Anggaran dapat diinterpretasikan sebagai paket pernyataan menyangkut perkiraan penerimaan dan pengeluaran yang diharapkan akan terjadi dalam satu atau beberapa periode mendatang (Bastian, 2017:191).

#### **2.1.6.2. Fungsi Anggaran Sektor Publik**

Menurut Mardiasmo (2018:63) anggaran sektor publik mempunyai beberapa fungsi yaitu:

1. Anggaran sebagai alat perencanaan
2. Anggaran sebagai alat pengendalian
3. Anggaran sebagai alat kebijakan fiskal
4. Anggaran sebagai alat politik
5. Anggaran sebagai alat koordinasi dan komunikasi
6. Anggaran sebagai alat penilaian kinerja
7. Anggaran sebagai alat motivasi
8. Anggaran sebagai alat untuk menciptakan ruang publik

#### **2.1.6.3. Jenis-Jenis Anggaran Sektor publik**

Menurut Mardiasmo (2018:66) anggaran sektor publik dibagi menjadi dua:

1. Anggaran Operasional  
Anggaran operasional digunakan untuk merencanakan kebutuhan sehari hari dalam menjalankan pemerintahan.
2. Anggaran Modal  
Anggaran modal menunjukkan rencana jangka panjang dan pembelanjaan atas aktiva tetap seperti gedung, peralatan, kendaraan, perabot dan sebagainya.

#### **2.1.6.4. Prinsip-Prinsip Anggaran Sektor Publik**

Menurut Majid (2019:40) prinsip-prinsip anggaran sektor publik meliputi :

1. Otorisasi oleh legislative
2. Komprehensif
3. Keutuhan anggaran
4. *Nondiscretionary Appropriation*
5. Periodik
6. Akurat
7. Jelas
8. Diketahui publik

#### **2.1.6.5. Proses penyusunan Anggaran Sektor Publik**

Mardiasmo (2018:68) menyebutkan proses penyusunan anggaran mempunyai empat tujuan yaitu:

1. Membantu pemerintah mencapai tujuan fiskal dan meningkatkan koordinasi antar bagian dalam lingkungan pemerintah.
2. Membantu menciptakan efisiensi dan keadilan dalam menyediakan barang dan jasa publik melalui proses pemrioritasan.
3. Memungkinkan bagi pemerintah untuk memenuhi prioritas belanja.



4. Meningkatkan transparansi dan pertanggungjawaban pemerintah kepada DPR/DPRD dan masyarakat luas.

#### **1.1.7. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)**

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) adalah laporan yang berisi akuntabilitas dan kinerja dari suatu instansi pemerintah yang merupakan realisasi hasil kegiatan dan menyajikan laporan kemajuan penyelenggaraan pemerintah (Triniyati, 2018).

### **3. METODE PENELITIAN**

#### **3.1. Rancangan Penelitian**

Rancangan penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian kali ini adalah metode kualitatif. Menurut Satori dan Komariah (2020:32) Penelitian kualitatif adalah suatu pendekatan penelitian yang mengungkapkan situasi sosial tertentu dengan mendeskripsikan kenyataan secara benar, dibentuk oleh kata-kata berdasarkan teknik pengumpulan dan analisis data yang relevan yang diperoleh dari situasi yang alamiah.

#### **3.2. Objek Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Komplek Perkantoran Pemda, Sungai Jering, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi.

#### **3.3. Populasi dan Sampel**

##### **3.3.1. Populasi**

Populasi dalam penelitian ini adalah Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kuantan Singingi.

##### **3.3.2. Sampel**

Sampel dalam penelitian ini adalah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) pada Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2019, 2020 dan 2021.

#### **3.4. Jenis dan Sumber Data**

##### **3.4.1. Jenis Data**

Jenis data dalam penelitian adalah data kuantitatif. Data ini diperoleh langsung dari subjeknya yaitu Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kuantan Singingi, namun masih harus dilakukan pengolahan lebih lanjut mengenai data target dan realisasi tahun anggaran 2019 sampai dengan 2021.

##### **3.4.2. Sumber Data**

Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan terbagi menjadi dua:

1. Data primer, yaitu hasil dari wawancara.



2. Data sekunder, yaitu Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) periode 2019-2021, literatur, jurnal, buku, skripsi terdahulu serta sumber-sumber yang berkaitan dengan *value for money* pada pengukuran kinerja sektor publik sebagai penunjang penelitian ini.

### 3.5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah:

1. Dokumentasi
2. Wawancara
3. Studi Kepustakaan
4. Observasi

### 3.6. Teknik Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan oleh peneliti adalah analisis deskriptif. Peneliti akan melakukan pengukuran kinerja keuangan melalui metode *value for money* dengan melihat 3 rasio, yaitu rasio ekonomis, rasio efisiensi, dan rasio efektivitas.

1. Ekonomis

Ekonomi adalah pemerolehan input dengan mutu serta kuantitas tertentu pada harga yang terendah. Ekonomi merupakan perbandingan *input* dengan *input value* yang dinyatakan dalam satuan moneter. Ekonomi terkait dengan sejauh mana organisasi sektor publik bisa meminimalisir *input resource* yang digunakan yaitu dengan menghindari pengeluaran yang boros dan tidak produktif.

Menurut Mahsun (2013:186) kriteria ekonomis adalah:

1. Jika diperoleh nilai kurang dari 100% ( $X < 100\%$ ) berarti ekonomis.
2. Jika diperoleh nilai sama dengan 100% ( $X = 100\%$ ) berarti ekonomis berimbang.
3. Jika diperoleh nilai lebih dari 100% ( $X > 100\%$ ) berarti tidak ekonomis.

Rumus untuk mengukur tingkat ekonomis menurut Mahmudi (2015:84) adalah:

$$\text{Ekonomis} = \frac{\text{Input}}{\text{Nilai Input}} \times 100\%$$

*Input* : Realisasi Anggaran  
*Input* merupakan sumber daya yang digunakan untuk pelaksanaan kebijakan program dan aktivitas.

Nilai *Input* : Anggaran  
Nilai *input* adalah target anggaran yang merupakan perencanaan keuangan yang ditetapkan sebelumnya pada rancangan kinerja.

2. Efisiensi

Efisiensi adalah pencapaian output yang maksimum dengan input tertentu ataupun pengguna input yang terendah untuk menggapai output tertentu. Efisiensi merupakan



perbandingan *output/input* yang dikaitkan dengan standar kinerja ataupun sasaran yang sudah ditetapkan. Semakin besar *output* dibandingkan *input*, maka semakin tinggi tingkat efisiensi suatu organisasi.

Menurut Mahsun (2013:187) kriteria efisiensi adalah:

1. Jika diperoleh nilai kurang dari 100% ( $X < 100\%$ ) berarti tidak efisien.
2. Jika diperoleh nilai sama dengan 100% ( $X = 100\%$ ) berarti efisiensi berimbang.
3. Jika diperoleh nilai lebih dari 100% ( $X > 100\%$ ) berarti efisien.

Rumus untuk mengukur tingkat efisiensi menurut Mahmudi (2015:85) adalah:

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Output}}{\text{Input}} \times 100\%$$

*Output* : Persentase capaian fisik dari program  
Angka *output* yang dimaksud adalah persentase realisasi fisik dari program-program yang dilaksanakan oleh suatu instansi.

*Input* : Persentase keuangan program  
Angka *input* yang dimaksud adalah persentase realisasi keuangan yang dikeluarkan untuk melaksanakan program-program dari suatu instansi.

### 3. Efektivitas

Efektivitas merupakan tingkatan pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan. Secara sederhana efektivitas merupakan perbandingan *outcome* dengan *output*.

Menurut Mahsun (2013:187) kriteria efektivitas adalah:

1. Jika diperoleh nilai kurang dari 100% ( $X < 100\%$ ) berarti tidak efektif.
2. Jika diperoleh nilai sama dengan 100% ( $X = 100\%$ ) berarti efektif berimbang.
3. Jika diperoleh nilai lebih dari 100% ( $X > 100\%$ ) berarti efektif.

Rumus untuk mengukur tingkat efektivitas menurut Mahmudi (2015:86) adalah:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Outcome}}{\text{Output}} \times 100\%$$

*Outcome* : Capaian kinerja  
Angka *outcome* yang dimaksud adalah realisasi yang telah dicapai akibat pelaksanaan program atau kegiatan.

*Output* : Target kinerja  
Angka *output* yang dimaksud adalah target sasaran dari program-program yang dilaksanakan oleh suatu instansi.

## 4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN



#### 4.1. Hasil Penelitian

Penelitian ini menggunakan konsep *value for money* yang bertujuan untuk mengetahui tingkat ekonomis, efisiensi serta efektivitas pada Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2019-2021. Berikut hasil penelitian berdasarkan konsep *value for money* :

##### 4.1.1. Pengukuran Ekonomi

Ekonomi merupakan perbandingan *input* dengan *input value* yang dinyatakan dalam satuan moneter. Ekonomi terkait dengan sejauh mana organisasi sektor publik bisa meminimalisir *input resource* yang digunakan yaitu dengan menghindari pengeluaran yang boros dan tidak produktif.

**Tabel 1. Hasil Perhitungan Ekonomi**

Tahun	Anggaran (nilai input)	Realisasi (input)	Tingkat Ekonomis	Ket
2019	2.911.731.165	2.722.063.594	93,49%	Ekonomis
2020	2.918.615.746	2.618.019.031	89,70%	Ekonomis
2021	9.036.226.923	7.449.251.716	82,44%	Ekonomis

Sumber: Data Sekunder Olahan, 2023

##### 4.1.2. Pengukuran Efisiensi

Efisiensi adalah pencapaian *output* yang maksimum dengan *input* tertentu ataupun pengguna *input* yang terendah untuk menggapai *output* tertentu. Efisiensi merupakan perbandingan *output/input* yang dikaitkan dengan standar kinerja ataupun sasaran yang sudah ditetapkan. Semakin besar *output* dibandingkan *input*, maka semakin tinggi tingkat efisiensi suatu organisasi.

**Tabel 2. Hasil Perhitungan Efisiensi**

Tahun	Realisasi Fisik (Output)	Realisasi Keuangan (Input)	Tingkat Efisiensi	Ket
2019	94,00%	93,49%	100,54%	Efisien
2020	90,00%	89,70%	100,33%	Efisien
2021	82,44%	82,44%	100,00%	Efisien
				Berimbang

Sumber: Data Sekunder Olahan, 2023

##### 4.1.3. Pengukuran Efektivitas

Menurut Mardiasmo (2018:4) efektivitas merupakan tingkatan pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan. Secara sederhana efektivitas merupakan perbandingan *outcome* dengan *output*.



**Tabel 3. Hasil Perhitungan Efektivitas**

Tahun	Capaian Kinerja (Outcome)	Target Kinerja (Output)	Tingkat Efektivitas	Ket
2019	93,49%	100,00%	93,49%	Tidak Efektif
2020	89,70%	100,00%	89,70%	Tidak Efektif
2021	82,44%	100,00%	82,44%	Tidak Efektif

Sumber: Data Sekunder Olahan, 2023

## 4.2. PEMBAHASAN

### 4.2.1. Pembahasan Hasil Perhitungan Ekonomis Tahun 2019-2021

Pada tahun 2019 hasil perhitungan ekonomis pada Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kuantan Singingi program/kegiatan yang telah dilakukan dinyatakan ekonomis dengan kriteria kurang dari 100,00% yaitu total keseluruhan program/kegiatan sebesar 93,49%.

Sedangkan pada tahun 2020 hasil perhitungan ekonomis pada Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kuantan Singingi program/kegiatan yang telah dilakukan dinyatakan ekonomis dengan kriteria kurang dari 100,00% yaitu total keseluruhan program/kegiatan sebesar 89,70%.

Selanjutnya pada tahun 2021 perhitungan ekonomis pada Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kuantan Singingi program/kegiatan yang telah dilakukan dinyatakan ekonomis dengan kriteria kurang dari 100,00% yaitu total keseluruhan program/kegiatan sebesar 82,44%.

Hasil perhitungan rasio ekonomis dari tahun 2019 ke tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 3,79%. Pada tahun 2020 ke tahun 2021 juga mengalami penurunan sebesar 7,26%. Artinya setiap tahun anggaran yang digunakan mengalami penghematan.

Dapat dibandingkan jika tahun 2021 anggaran yang digunakan dinyatakan sangat ekonomis dari pada tahun 2020 dan 2019 karena total keseluruhan program/kegiatan sebesar 82,44% lebih kecil dibandingkan dengan tahun 2020 dan 2019. Akan tetapi anggaran pada tahun 2021 belum terealisasi secara maksimal karena terdapat beberapa kegiatan yang realisasi anggarannya sangat kecil daripada target anggaran yang telah ditetapkan dan juga terdapat 3 kegiatan yang anggarannya tidak terealisasi hal ini disebabkan karena kasus Covid-19 yang terus meningkat setiap tahunnya serta pemberlakuan PPKM yang terus diperpanjang.

### 4.3.1. Pembahasan Hasil Perhitungan Efisiensi Tahun 2019-2021

Pada tahun 2019 hasil perhitungan efisiensi pada Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kuantan Singingi program/kegiatan yang telah dilakukan dinyatakan efisien dengan kriteria lebih dari 100,00% yaitu total keseluruhan program/kegiatan sebesar 100,54%.



Sedangkan pada tahun 2020 hasil perhitungan efisiensi pada Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kuantan Singingi program/kegiatan yang telah dilakukan dinyatakan efisien dengan kriteria lebih dari 100,00% yaitu total keseluruhan program/kegiatan sebesar 100,33%.

Selanjutnya pada tahun 2021 hasil perhitungan efisiensi pada Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kuantan Singingi program/kegiatan yang telah dilakukan dinyatakan efisien berimbang dengan kriteria sama dengan 100,00% yaitu total keseluruhan program/kegiatan sebesar 100,00%.

Hasil perhitungan rasio efisiensi pada tahun 2019 ke tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 0,21%. Pada tahun 2020 ke tahun 2021 juga mengalami penurunan sebesar 0,33%. Artinya setiap tahun anggaran yang digunakan terus mengalami penurunan tingkat efisiensi.

Dapat dibandingkan jika rasio efisiensi pada tahun 2019 lebih tinggi dari pada tahun 2020 dan 2021. Hal ini menunjukkan bahwa tahun 2019 lebih efisien dari pada tahun 2020 dan 2021. Pada tahun 2020 dan 2021 tingkat rasio efisiensi lebih kecil dibandingkan 2019 hal ini disebabkan karena kasus Covid-19 yang terus meningkat setiap tahunnya sehingga belanja untuk pelaksanaan program/kegiatan tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya.

#### **4.3.2. Pembahasan Hasil Perhitungan Efektivitas Tahun 2019-2021**

Pada tahun 2019 hasil perhitungan efektivitas pada Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kuantan Singingi dinyatakan tidak efektif dengan kriteria kurang dari 100,00% yaitu total keseluruhan indikator kinerja sebesar 93,49%.

Sedangkan pada tahun 2020 hasil perhitungan efektivitas pada Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2020 dinyatakan tidak efektif dengan kriteria kurang dari 100,00% yaitu total keseluruhan indikator kinerja sebesar 89,70%.

Selanjutnya pada tahun 2021 hasil perhitungan efektivitas pada Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kuantan Singingi dinyatakan tidak efektif dengan kriteria kurang dari 100,00% yaitu total keseluruhan indikator kinerja sebesar 82,44%.

Dapat dibandingkan jika tahun 2019 sampai tahun 2021 capaian indikator kinerja setiap tahunnya mengalami penurunan yang signifikan, dari tahun 2019 ke tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 3,79%. Pada tahun 2020 ke tahun 2021 juga mengalami penurunan sebesar 7,26% yang artinya capaian target dari indikator kinerja yang ditetapkan tidak tercapai. Hal ini juga disebabkan karena kasus Covid-19 yang meningkat setiap tahunnya dan PPKM yang terus diperpanjang hingga tahun 2022 yang mengakibatkan terkendalanya program/kegiatan yang akan dilakukan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kuantan Singingi.

#### **4.3.4. Pelayanan Masyarakat**

##### **1. Administrasi/Persyaratan**

Berdasarkan pengamatan secara langsung administrasi untuk pelayanan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kuantan Singingi cukup jelas



dan mudah, persyaratan yang diperlukan tergantung layanan yang kita butuhkan. Setiap layanan yang kita butuhkan telah dibuat spanduk yang ditempelkan pada lobi atau ruang tunggu, kita dapat membaca dan melihat secara jelas apa saja persyaratan yang dibutuhkan sesuai dengan pelayanan yang kita perlukan. Persyaratan juga dicantumkan pada website resmi Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kuantan Singingi. Setelah semua persyaratan telah dipenuhi barulah selanjutnya akan diproses sesuai dengan pelayanan yang dibutuhkan.

## 2. Waktu Pelayanan

Waktu pelayanan juga tergantung dengan jenis layanan yang kita butuhkan. Terdapat 13 jenis layanan untuk urusan sosial dan 2 jenis layanan untuk urusan pemberdayaan masyarakat dan desa.

### 1. Sistem Mekanisme dan Prosedur

Untuk mekanisme dan prosedur layanan yang kita butuhkan cukup mudah dan jelas, jika semua persyaratan sudah lengkap oleh pemohon maka segera akan di proses oleh petugas sesuai dengan jenis layanan yang kita butuhkan.

### 4. Biaya/Tarif

Untuk semua jenis layanan yang ada pada Dinas Sosial Pemeberdayaan Masyarakat dan Desa tidak dipungut biaya atau gratis. Jika ada pungutan biaya oleh petugas kita dapat melakukan pengaduan secara langsung dan akan segera ditindak lanjuti, karena semua layanan yang kita butuhkan tidak dipungut biaya apapun.

### 5. Produk Pelayanan

Produk pelayanan yang kita peroleh dari Dinas Sosial Pemeberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kuantan Singingi adalah:

1. Bantuan sembako, pakaian dan kebutuhan lainnya untuk korban bencana alam
2. Surat Rekomendasi Izin Pengangkatan Anak Terlantar
3. Surat Rujukan Layanan Disabilitas Fisik ( Bbir Sumbing)
4. Surat Rujukan Disabilitas Mantal Terlantar
5. Surat Rujukan Lanjut Usia Terlantar
6. Laporan Sosial Anak Berhadapan Dengan Hukum
7. Data DTKS yang Baru/ yang Diperbaiki
8. Peningkatan Data PBI PD Pemda
9. Surat Keterangan Tidak Mampu
10. Surat Rekomendasi Izin Pendirian Panti Sosial
11. Surat Rekomendasi Izin Operasional Panti Sosial
12. Surat Rekomendasi Izin Pengumpulan Uang dan Barang
13. Surat Rekomendasi Dana Hibah Sosial
14. Penerbitan SK Pengangkatan/ Pemberhentian Kepala Desa/BPD

### 6. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

Jika ada pengaduan maka akan segera ditindak lanjuti, tim pengelola pengaduan akan segera melakukan rapat pembahasan pengaduan dan akan segera dilakukan perbaikan agar layanan masyarakat dapat terpenuhi dengan maksimal. Untuk saran dan masukan juga disediakan oleh Dinas Sosial Pemeberdayaan Masyarakat dan desa yaitu berupa kotak saran dan masukan





baik di kantor dan di website resmi di sana kita dapat memeberikan saran dan masukan demi perbaikan layanan yang dilakukan oleh Dinas Sosial.

#### **4.3.5. Sarana dan Prasarana**

Berdasarkan pengamatan langsung sarana dan prasarana untuk pelayanan sudah memadai mulai dari ruang tunggu, yaitu ketersediaan kursi tunggu, hanya saja masih terbatas apabila banyak orang yang datang maka kursi ruang tunggu tidak akan cukup, selanjutnya komputer untuk menginput data layanan pada setiap bidang dan ini sudah tersedia setiap satu orang petugas satu komputer, mesin print dan photocopy yang juga sudah tersedia pada setiap bidang. Hanya saja terdapat beberapa bidang yang ruangnya tidak tertata dengan rapi, sehingga tampak sempit sehingga perlu untuk ditata agar luas dan nyaman.

#### **4.3.6. Kepuasan Masyarakat**

Berdasarkan pengamatan langsung dan tanya jawab yang dilakukan peneliti dengan beberapa orang yang datang ke Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kuantan Singingi terkait bagaimana kualitas pelayanan yang diberikan yaitu masyarakat merasa puas atas pelayanan yang diberikan, prosedur dan mekanisme layanan yang kita butuhkan tidak sulit dan tidak berbelit-belit, persyaratan yang dibutuhkan juga sudah jelas dan mudah serta tidak dipungut biaya apapun. Apabila persyaratan sudah lengkap maka akan segera di proses sesuai dengan jenis layanan yang kita butuhkan.

Berdasarkan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kuantan Singingi memperoleh nilai IKM sebesar 82,87 dengan kategori A, itu artinya masyarakat merasa puas atas pelayanan yang diberikan oleh Dinas Sosial. Dinas Sosial memberikan kuesioner kepada masyarakat yang datang, masyarakat dapat mengisi kuesioner berdasarkan pelayanan yang telah diberikan, di website resmi Dinas Sosial juga disediakan link kuesioner untuk mengetahui tingkat kepuasan layanan masyarakat yang telah dilakukan.

## **5. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan judul *Analisis Value For Money* Pada Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kuantan Singingi dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Ditinjau dari rasio ekonomis program/kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kuantan Singingi pada tahun 2019-2021 dinyatakan ekonomis. Tahun 2019 total keseluruhan program/kegiatan sebesar 93,49%, tahun 2020 sebesar 89,70% dan tahun 2021 sebesar 82,44%.
2. Ditinjau dari rasio efisiensi program/kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kuantan Singingi pada tahun 2019 dinyatakan efisien dengan total keseluruhan program/kegiatan sebesar 100,54%, tahun 2020



dinyatakan efisien dengan total keseluruhan program/kegiatan sebesar 100,33% dan tahun 2021 dinyatakan efisien berimbang dengan total keseluruhan program/kegiatan sebesar 100,00%.

3. Ditinjau dari rasio efektivitas indikator kinerja yang dicapai oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kuantan Singingi pada tahun 2019,2020 dan 2021 dinyatakan tidak efektif dengan kriteria kurang dari 100%
4. Ditinjau dari segi pelayanan masyarakat, sarana dan prasarana serta kepuasan masyarakat sudah dikatakan baik.

### **UCAPAN TERIMA KASIH**

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Analisis *Value For Money* Pada Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kuantan Singingi”.

Penyusunan skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Akuntansi (SI) pada Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, hal ini dikarenakan terbatasnya pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki oleh penulis. Oleh karena itu kritik dan saran masih sangat diharapkan oleh penulis guna memperoleh kesempurnaan dalam skripsi ini.

Dalam kesempatan kali ini penulis juga ingin mengucapkan terima kasih sebesar besarnya atas segala bantuan, bimbingan, dukungan, saran dan fasilitas dari berbagai pihak dalam pembuatan skripsi ini, diantaranya kepada:

1. Bapak **Dr. Nopriadi, S.K.M M.Kes** selaku Rektor Universitas Islam Kuantan Singingi.
2. Ibu **Rika Ramadhanti, S.IP., M.Si** selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi.
3. Ibu **Rina Andriani, S.E., M.Si** selaku Ketua Prodi Akuntansi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi.
4. Ibu **Dessy Kumala Dewi, SE., M.Ak** selaku dosen pembimbing I yang telah banyak memberikan bimbingan dan waktu serta saran untuk menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak **Zul Ammar, SE., ME** selaku dosen pembimbing II yang telah banyak memberi bimbingan dan waktu serta saran untuk menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen serta Seluruh Staf Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi yang telah banyak membantu dan memberikan ilmu selama penulis menuntut ilmu hingga selesai.
7. Ibu **Linda Desmita, SE** dan Pegawai Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kuantan Singingi yang telah memberikan data yang dibutuhkan dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Teristimewa ucapan terimakasih kepada orang tua tercinta, ibunda **Rosmiati** atas semua bantuan baik moril materil dan kasih sayangnya yang tak terhingga sampai sekarang, serta doanya untuk penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.



Juhanperak  
e-ISSN : 2722-984X  
p-ISSN : 2745-7761

9. Saudari penulis **Sepriandi, Anggi Latria, Audia Parawitawitri, dan Julyan M. Ramahdian** terimakasih karena telah banyak mensupport dan mendoakan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Untuk teman-teman terbaik penulis, **Bencana Squad (Renita, Nur Safrianis, Priti Anggun Pramesti, Indri Oktavia Ningsi)** yang telah memberikan semangat dan masukan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Seluruh temen-teman Akuntansi angkatan 2019 dan rekan-rekan seperjuangan yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu, atas kebersamaan dan kerjasamanya.

Akhir kata, semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya untuk membalas kebaikan dari semua pihak yang telah mendukung dan membantu penulis selama ini. Dengan segala kerendahan hati, penulis memohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kekurangan dan keterbatasan dalam penulisan skripsi ini. Besar harapan bagi penulis bahwa skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi berbagai pihak.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku :

- Bastian, Indra. 2017. *Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar*. Edisi Ketiga. Jakarta: Erlangga.
- Hartati, Andi dkk. 2022. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik Teori dan Aplikasi*. Bandung: Media Sains Indonesia.
- Komariah, Aan. dan Djam'an Satori. 2020. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Mardiasmo. 2018. *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi Terbaru. Yogyakarta: Andi
- Mahsun, Mohamad. 2013. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Edisi pertama. Yogyakarta: BPFÉ.
- Mahsun, Mohamad. Firma, Sulistiyowati. dan Heribertus, Andre, Purwanugraha. 2015. *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi Ketiga. Yogyakarta: BPFÉ.
- Mahmudi, 2015. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Edisi ketiga. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Majid, Jamaluddin. 2019. *Akuntansi Sektor Publik*. Gowa: Pusaka Almaidah.
- Sugiyono, 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta.
- Sujarweni, V. Wiratna. 2015. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.

### Skripsi :



**Juhanperak**  
**e-ISSN : 2722-984X**  
**p-ISSN : 2745-7761**

- Fadilla, Della. 2021. *Analisis Value For Money Pada Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kesehatan Provinsi Riau*. Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Riau.
- Hidayah, Asrob. 2017. *Analisis Kinerja Keuangan Pada Kegiatan Dinas Sosial Labuhanbatu Selatan Dengan Menggunakan Konsep Value For Money*. Skripsi. IAIN Padangsidempuan.
- Putri, Nur Zeni. Amilia. 2020. *Analisis Value For Money Pada Kinerja Keuangan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur*. Skripsi. UIN Sunan Ampel Surabaya.
- Rahman, Winia Aulia. 2021. *Analisis Value For Money Pada Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Riau*. Skripsi. Universitas Islam Riau.
- Rahayu, Eka Febyanti. 2020 . *Analisis Kinerja Keuangan Dengan Pendekatan Value For Money Pada Distrik Navigasi Kelas II Banjarmasin Tahun 2016-2019*. Skripsi. STIE Indonesia Banjarmasin.
- Ramadhan, Arief Rizki. 2014. *Implementasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dalam Rangka Mewujudkan Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah Berdasarkan Good Governance (Studi di Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi)*. Skripsi. Brawijaya University.
- Triniyati. 2018. *Analisis Kinerja Dinas Pertanian kabupaten Simalungun Dengan Pendekatan Value For Money Periode Tahun 2015-2017*. Skripsi. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
- Zhafirah, Athaya. 2022. *Analisis Value For Money Pada Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Sosial Provinsi Riau*. Skripsi. Universitas Islam Riau.

**Jurnal :**

- Agustin, Risa Dwi, dan Anang Subarjo. 2017. *Konsep Value For Money Dalam Mengukur Kinerja Pelayanan Sektor Publik*. Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA), 6(6).
- Khalikussabir. 2017. *Analisis Kinerja Keuangan Berdasarkan Value For Money (Studi Kasus Pada Dinas PU Pengairan, PU Binamarga & PU Cipta Karya Kabupaten Probolinggo)*. E-JRM: Elektronik Jurnal Riset Manajemen, 6(03).
- Polii, Imanuel RA, David PE Saerang, and Steven J. Tangkuman. 2020. *Analisis Pengukuran Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara Berdasarkan Konsep Value for Money*. Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi, 8.4.



**Juhanperak**  
**e-ISSN : 2722-984X**  
**p-ISSN : 2745-7761**

Purwiyanti, Dwi. 2017. *Analisis Kinerja Berbasis Konsep Value for Money Pada Kegiatan Fisik Pekerjaan Irigasi Donggala Kodi (Study Di Dinas Pekerjaan Umum Kota Palu)*. Katalogis, 5(3).

Rinaldy, Rifka. 2018. *Analisis Kinerja Keuangan Dengan Pendekatan Value For Money Pada Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya Periode 2013-2015*. Jurnal Akuntansi Muhammadiyah, 8.1.

Yusrianti, Hasni, dan Rika Hendra Safitri. 2015. *Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Kota Palembang*. Jurnal Manajemen dan Bisnis Sriwijaya, 13(4), 545-558.

**Peraturan dan Perundang-undangan :**

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.

**Website :**

<https://disospemdes.kuansing.go.id>. Diakses pada 18 Desember 2022

<http://peraturan.bpk.go.id>. Diakses pada 18 Desember 2022